



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

EITI
INDONESIA

Extractive
Industries
Transparency
Initiative

RAPAT MSG

Sekretariat EITI
22 Agustus 2016

Agenda

- Rencana kerja EITI 2016
- Penyelesaian Laporan EITI TA 2014
- Penyusunan Laporan Tahunan
- Rencana penyusunan Roadmap BO
- Tindak lanjut rekomendasi Laporan EITI TA 2012-2013

Objective 1:

Peningkatan transparansi pengelolaan industri ekstraktif Indonesia.

Rational:

Industri ekstraktif menyangkut penerimaan negara yg besar, namun selama ini pengelolaannya cenderung hanya diketahui kalangan terbatas shg potensi terjadinya ketidakefisienan yg mengarah pd korupsi sangat besar. Upaya transparansi diharapkan dpt mencegah potensi korupsi dan meningkatkan efisiensi dan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja industri ekstraktif di Indonesia

Tantangan yg dihadapi adalah:

1. masih rendahnya kesadaran dari parapihak untuk berpartisipasi aktif dlm proses keterbukaan informasi publik;
2. masih adanya regulasi yg tidak sejalan dgn semangat keterbukaan;

Activities	Outcomes	Responsible party	Timeline	Cost	Funding Source
<p>1. Menyusun Laporan EITI 2014 dan 2015, termasuk memasukkan informasi yg belum dicakup di workplan 2014-2015, sbb:</p> <p>a. Perhitungan DBH per kab/perusahaan</p> <p>b. Informasi data <i>cost recovery</i></p> <p>c. Data produksi dan penjualan</p> <p>d. Implementasi MPN</p>	<p>Tersedianya informasi tatakelola industri ekstraktif Indonesia yg dpt diketahui masyarakat luas, termasuk data DBH, cost recovery, data produksi dan penjualan, dan implementasi MPN</p>	<p>Kemen. ESDM, Kemenko Perekonomian (Sekretariat EITI)</p>	<p>June-Nov</p>	<p>1800</p>	<p>MDTF</p>

2. Melaksanakan sosialisasi:					
a. Menyusun strategi komunikasi	Partisipasi stakeholder dlm sosialisasi laporan EITI	MSG, Sekretariat	May		
b. Melaksanakan sosialisasi Laporan EITI di tingkat Nas dan provinsi	Masyarakat di tingkat nasional dan provinsi lebih mengetahui ttg penerimaan negara dr industri ekstraktif	Sekretariat	June- August	440	MDTF
c. Melaksanakan diskusi dgn komunitas masyarakat daerah tambang	Meningkatnya kepedulian masyarakat thd pembangunan pertambangan	Sekretariat, Mitra CSO	Oct	200	MDTF
d. Melaksanakan talkshow radio	Masyarakat luas khususnya yg terjangkau siaran radio tsb dapat lebih mengetahui ttg perkembangan isu-isu EITI	Sekretariat, MSG	Aug- Nov	120	GOI
e. Pembuatan newsletter	Masyarakat luas dapat lebih mengetahui ttg perkembangan isu-isu EITI	Sekretariat	Jun, Oct	10	GOI
f. Penyampaian laporan kpd SC dan surat apresiasi kepada stakeholders	Kepedulian dari anggota SC dan stakeholder meningkat	MSG, Sekretariat	Febr, Dec	15	GOI
g. Menggandakan Laporan EITI utk distribusi kpd stakeholder	Tersedianya sumber data shg masyarakat dpt lebih mudah mempelajari informasi ttg Laporan EITI	Sekretariat	May	300	GOI

3. Melakukan diskusi publik:					
a. Diskusi dgn pemerintah daerah	1. Meningkatnya pengetahuan bersama ttg isu-isu industri ekstraktif di daerah; 2. Identifikasi perlunya perbaikan kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota	Sekretariat, Pemda	Sept	80	MDTF
b. Diskusi dgn akademisi dan perusahaan	Merumuskan isu dan alternatif solusi bagi tata kelola industri ekstraktif	Sekretariat, PT, Perusahaan	Sept		
4. Meningkatkan kualitas laporan					
a. Diskusi bulanan utk tema2 tertentu, termasuk membahas tindak lanjut rekomendasi Laporan EITI 2015	Meningkatnya pemahaman stakeholder ttg isu2 tematik, termasuk langkah2 tindak lanjut rekomendasi Laporan EITI 2015	Sekretariat, MSG	June-Aug	80	MDTF
b. Diskusi utk persiapan validasi	Tersusunnya informasi ttg proses, output yg telah dicapai, tindak lanjut yg diperlukan, serta peran serta parapihak dalam penyusunan laporan EITI	Sekretariat, MSG	Sept-Nov	80	MDTF
c. Penguatan <i>scoping notes</i>	Tersedianya bahan2 terkait data, informasi, isu permasalahan yang harus dicakup dalam laporan EITI tahap berikutnya	Sekretariat, MSG	Aug-Oct	na	
5. Melaksanakan monitoring/outreach	Tersosialisasinya informasi ttg EITI dan sinkronisasi kebijakan	Sekretariat	May-Oct	310	GOI

Objective 2:

Perbaikan tata kelola industri ekstraktif

Rationale:

Beberapa peraturan per-UU-an terkait tata kelola industri ekstraktif masih ada yg tidak sejalan dgn semangat transparansi. Utk itu perlu dilakukan review utk mengidentifikasi peraturan2 mana yg perlu diperbaiki, substansi perbaikan yg diperlukan, siapa yg bertanggung jawab terhadap revisi/perbaikan, dan bagaimana mekanisme proses perbaikan tersebut

Tantangan yang dihadapi:

1. kesadaran yg rendah utk berubah dan cenderung mempertahankan kemapanan (status quo);
2. mekanisme perubahan tata kelola memerlukan keterlibatan banyak pihak shg cenderung sulit/memakan waktu dan konsistensi parapihak untuk menyelesaikannya

Activities	Outcomes	Responsible party	Timeline	Cost	Funding Source
1. Melaksanakan impact assessment	Tersedianya informasi lengkap tentang manfaat yg didapat dari keberadaan EITI sejak 2010, isu2 yg masih belum dapat diselesaikan, dan kendala2 yg dihadapi dalam pelaksanaan	MSG, Sekretariat EITI	MSG, Sekretariat	na	
2. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan EITI					
a. Diskusi dgn akademisi dan perusahaan	Merumuskan isu dan alternatif solusi bagi tata kelola industri ekstraktif	Sekretariat, PT, Perusahaan	Sept	80	MDF
b. Pelatihan stakeholder EITI	Meningkatnya pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi stakeholder thd isu2 EITI	MSG, Sekretariat EITI	May, Oct	na	
c. Penguatan database EITI meliputi:					
i. Pengembangan portal data EITI	Mudahnya akses data EITI untuk berbagai keperluan	WB, MSG, Sekretariat	Jan-May	*	WB
ii. Pelatihan database utk stakeholder	Meningkatnya kemampuan stakeholder dlm mengakses dan interpretasi data EITI	WB, MSG, Sekretariat, Konsultan	July	*	WB
iii. Memperkaya cakupan dan analisis data	Meningkatnya ketersediaan dan hasil analisa data EITI	Sekretariat	June-Nov	10	GOI

d. Mengikuti seminar, konferensi, workshop	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta	MSG, Sekretariat	Febr- Dec	544	GOI
e. Mendorong keterlibatan Pemda dlm EITI	Meningkatkan kapasitas Pemda terkait EITI	MSG, Sekretariat	July- Nov	-	
f. Capacity building utk IUP	Meningkatnya kapasitas pemegang IUP	MSG, Sekretariat		na	
g. Pemberian " <i>good performance and commitment label</i> " kpd perusahaan dan K/L	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi perusahaan dan K/L	MSG, Sekretariat		na	
3. Review peraturan per- UU-an terkait EITI	Identifikasi peraturan2 yg perlu diperbaiki, substansi perbaikan yg diperlukan, siapa yg bertanggung jawab terhadap revisi/perbaikan, dan bagaimana mekanisme proses perbaikan tersebut	Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, MSG, Sekretariat EITI	June- Oct	20	GOI

Objective 3:

Meningkatnya kegiatan pembangunan industri ekstraktif melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah nasional

Rationale:

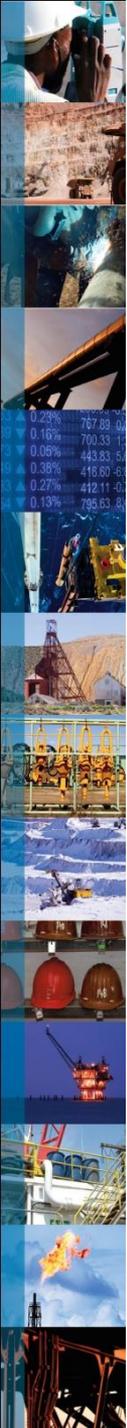
Kekayaan SDA Indonesia masih belum optimal dimanfaatkan bagi kepentingan nasional. Krn itu perlu terus didorong kebijakan utk meningkatkan pembangunan industri ekstraktif dgn meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah bagi kepentingan nasional

Tantangan yg dihadapi:

1. tata kelola yg masih harus terus diperbaiki;
2. kemampuan nasional yg terbatas, baik dr sisi modal, teknologi, dan SDM;
3. ketergantungan pd asing

Activities	Outcomes	Responsible party	Timeliness	Cost	Funding Source
1. Meningkatkan sosialisasi ttg upaya transparansi industri ekstraktif Indonesia	1. Tersosialisasikannya perbaikan pengelolaan industri ekstraktif	Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, MSG, Sekretariat EITI	Oct	10	GOI

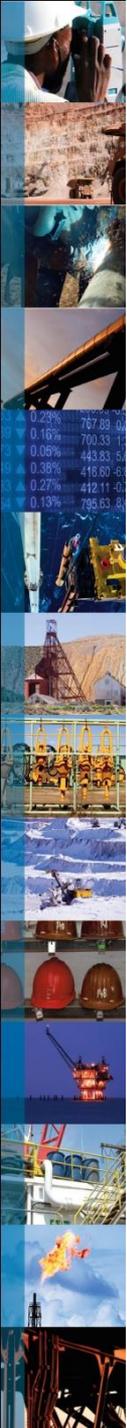
PENYUSUNAN LAPORAN EITI TAHUN 2014



Isu Bahasan

- Pengadaan Independent Administrator (IA)
- Permasalahan
- Rencana Penyelesaian

Penyusunan Roadmap Beneficial Ownership (BO)



Penyusunan Roadmap BO

Tujuan:

- Menghasilkan roadmap BO industri ekstraktif di Indonesia yang berguna sebagai referensi para pihak dalam menyusun dan mensinkronkan kegiatan masing-masing sehingga nantinya dapat diperoleh informasi BO industri ekstraktif yang berguna untuk meningkatkan kinerja industri ekstraktif nasional
- Menginventarisir dan mensinkronkankan pandangan para pihak tentang pentingnya informasi BO industri ekstraktif bagi kinerja penerimaan negara dan pembangunan Indonesia
- Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan roadmap sehingga dapat diantisipasi langkah-langkah untuk mencari jalan keluar
- Mengidentifikasi kerangka hukum dan kelembagaan yang diperlukan bagi pelaksanaan roadmap sehingga informasi BO dapat diperoleh dengan lebih mudah secara tersistem

Ruang Lingkup Penyusunan Roadmap

1. Mengidentifikasi dan melibatkan para pihak yang terkait erat dengan informasi BO sehingga dapat diperoleh masukan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan
2. Menyusun rencana dan jadwal kerja bersama mengacu kepada kebutuhan dan guidance EITI International, antara lain sbb:
 - a. Mendiskusikan bagaimana kaitan antara keterbukaan informasi BO dengan prioritas pencapaian tujuan nasional
 - b. Mempertimbangkan tersedianya kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi yang memadai agar keterbukaan informasi BO dapat dilakukan dengan mudah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional
 - c. Menetapkan definisi sesuai dgn standar international, pengertian di hukum national, dan dapat mengakomodasi pelaporan dalam laporan EITI, termasuk menetapkan adanya batas minimum (threshold) kepemilikan saham
 - d. Kewajiban pelaporan untuk “tokoh politik” (politically exposed persons) terkait dengan BO

- 
- e. Menetapkan tingkat kerincian dari informasi BO
 - f. Mempertimbangkan kemudahan dalam mengumpulkan informasi BO (prosedur)
 - g. Mengembangkan metodologi untuk memastikan akurasi informasi BO
 - h. Memberikan informasi terkini yg tersedia
 - i. Menyampaikan data dalam bentuk open data format (excel)
 - j. Meningkatkan kapasitas bagi para pihak
 - k. Mempertimbangkan kebutuhan bantuan teknis dan financial
 - l. Mempertimbangkan penyelesaian roadmap sesuai *deadline*
3. Menyusun draft roadmap untuk dapat disepakati oleh MSG
 4. Menyampaikan Roadmap BO Indonesia kepada EITI International

Parapihak Yang Terkait:

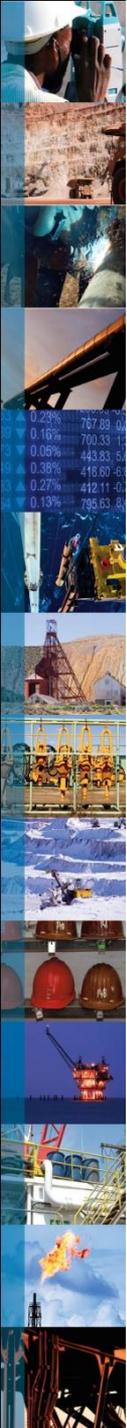
1. Kementerian dan Lembaga:

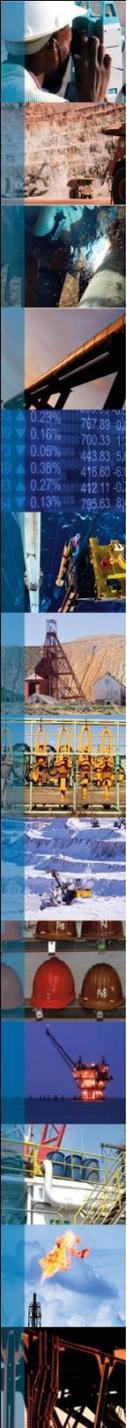
- a. Kemenko Perekonomian
- b. Kemenko Polhukam
- c. Kemenko Maritim
- d. Kementerian Keuangan
- e. Kementerian Hukum dan HAM
- f. Kementerian ESDM
- g. Kementerian PPN/Bappenas
- h. Bank Indonesia
- i. OJK
- j. BKPM
- k. KPK

Rencana Kerja Penyusunan Roadmap:

Kegiatan	Waktu	Keterangan
1. Rapat MSG	M3 Agustus	MSG
2. Penyusunan draft zero	M1-2 September	Sekretariat EITI/Tim Teknis
3. Diskusi/pembahasan draft awal	M3 September	Tim BO
4. Diskusi/pembahasan draft awal	M4 September	Tim BO
5. Penyusunan Draft 1	M1-2 Oktober	Sekretariat EITI/Tim Teknis
6. Diskusi/pembahasan Draft 1	M3 Oktober	Tim BO
7. Pembahasan MSG	M4 Oktober	MSG
8. Seminar	M3 November	Tim BO ++
9. Penyusunan Draft Roadmap	M1 Desember	Sekretariat EITI/Tim Teknis
10. Persetujuan Roadmap BO	M2/3 Desember	MSG

Impact Assessment





TERIMA KASIH